



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/PAWKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 April 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2017/ PA. WKB tanggal 25 April 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Barat..

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang pelaksanaannya diwalikan kepada ustaz di daerah tersebut yang bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

✓ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.
- ✓ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Ahmad Rifai, Nomor : 108/53.12/022.004/WTN/IV/2017, tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wetana.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/195/HK.05/IV/2017 tanggal 18 April 2017.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 27 April 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Asli surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I Nomor : 111/53.12/022.004/WTN/IV/2017 tetanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wetana, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilegalisasi, bermaterai cukup, selanjutnya Majelis Hakim diberi tanda (P1).
- Asli surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II Nomor : 114/53.12/022.004/WTN/IV/2017 tetanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilegalisasi, bermaterai cukup, selanjutnya Majelis Hakim diberi tanda (P2).

Bahwa disamping alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjaga [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.

Nusa Tenggara Barat, saksi mengetahuinya karena saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali
nikah bapak kandung Pemohon II [REDACTED] yang diwakilkan [REDACTED]
[REDACTED] di daerah tersebut yang bernama [REDACTED] dengan disaksikan
oleh saksi [REDACTED]

✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai.

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang namun belum dikaruniai keturunan.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Saksi kedua : [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.

✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008 di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat, saksi mengetahuinya karena saksi diundang saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi tidak dapat hadir.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah bapak kandung Pemohon II [REDACTED] yang diwakilkan kepada Ustaz di daerah tersebut yang bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh saksi [REDACTED]

✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai.

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang namun belum dikaruniai keturunan.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Barat oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No. [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2008 di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat,, dengan wali nikah wali bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] namun pelaksanaannya diwakilkan kepada Ustaz setempat bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut namun belum dikaruniai anak. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka serta keperluan lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jis. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah Kabupaten Sumba Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Menimbang,, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah wali bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] namun pelaksanaannya diwakilkan kepada ustaz di daerah setempat bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah yang bernama [REDACTED] dengan mahar uang [REDACTED]

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga saat ini belum dikaruniai keturunan serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 2008 di [REDACTED]

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Ustaz daerah setempat bernama [REDACTED] dengan

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu, keduanya tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2008 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2008, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/195/HK.05/IV/2017 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Plh. Ketua Pengadilan agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017.

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 di Pengkalak Mas RT.01 RW.01, Kelurahan Pengkalak Mas, kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017 sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MUHAMAD NAWIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Panitera pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)